



Risalah Kebijakan

Nomor 4, Mei 2021

Optimalisasi Penerapan **Protokol Kesehatan** dalam Pembelajaran **Tatap Muka** pada Masa Pandemi **COVID-19**



Ringkasan Temuan

- Sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka telah cukup baik dalam menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah.
- Sekolah-sekolah di berbagai daerah melakukan pembelajaran tatap muka sesuai protokol kesehatan, namun dengan cara yang beragam sesuai konteks lokal.
- Sebagian warga sekolah masih sering lalai mematuhi protokol kesehatan karena kurang optimalnya pengawasan di sekolah.
- Waktu pulang sekolah menjadi saat yang sangat rentan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan karena sekolah tidak dapat melakukan pengawasan di luar lingkungan sekolah.

Konteks

Pembukaan kembali sekolah di satu sisi sangat berisiko mengingat penyebaran COVID-19 masih belum terkendali. Di sisi lain, keterbatasan dalam aktivitas belajar dari rumah juga menimbulkan permasalahan cukup serius terhadap tumbuh kembang anak. Belajar dari rumah sangat bergantung pada akses internet. Di Indonesia, tidak semua wilayah dan rumah tangga memiliki akses yang baik pada internet (Zamjani dkk, 2020). Hal ini menjadikan proses belajar dari rumah tidak berjalan optimal. Akibatnya, selama siswa dikembalikan ke rumah banyak terjadi penurunan kemampuan belajar (*learning loss*) hingga ancaman putus sekolah (SMERU, 2020; The Economist, 2020; World Bank, Agustus 2020).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri selama tahun 2020 telah tiga kali mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Pertama pada 15 Juni 2020, pemerintah mengizinkan sekolah di wilayah zona hijau untuk melakukan belajar tatap muka atas persetujuan pemerintah daerah setempat dan komite sekolah atau orang tua. Kemudian pada 7 Agustus 2020, pemerintah memperluas izin pembelajaran tatap muka dengan mempersilakan sekolah di zona kuning memulai belajar tatap muka apabila dirasa aman dan mendapatkan persetujuan pemerintah daerah dan orang tua. Pada 20 November 2020, pemerintah kembali melonggarkan persyaratan pembukaan sekolah dengan tidak lagi berdasarkan zona penyebaran COVID-19, tetapi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah setempat dalam memberikan izin kepada sekolah yang telah siap melakukan pembelajaran tatap muka, namun tetap melalui persetujuan orang tua.

Sekolah yang dinyatakan siap adalah sekolah yang telah mengisi daftar periksa melalui aplikasi Dapodik, antara lain: (1) memastikan ketersediaan sarana sanitasi, seperti toilet bersih, tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, masker, alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*), cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan disinfektan; (2) mampu menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik; (3) melakukan pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki kondisi medis tertentu (penyakit bawaan/komorbid), data akses warga ke sekolah, data riwayat perjalanan warga satuan pendidikan; serta (4) membuat kesepakatan bersama komite sekolah terkait kesiapan pembelajaran tatap muka.

Merespons pentingnya memahami kondisi kesiapan sekolah dalam menjalankan PTM, maka Pusat Penelitian Kebijakan melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana sekolah-sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka menerapkan protokol kesehatan. Kajian ini dilakukan dari Agustus sampai November 2020. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terpusat (DKT) dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Direktorat SD, Direktorat SMP, perwakilan guru dari beberapa sekolah di DKI Jakarta, serta guru dan kepala sekolah dari sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka di Aceh, Bangka Belitung, dan Nusa Tenggara Barat. Sekolah-sekolah di daerah tersebut dipilih dari yang telah melakukan pembelajaran tatap muka paling sedikit selama satu bulan, di mana pada saat bersamaan daerah lain masih banyak yang belum memulai pembelajaran tatap muka.

Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan protokol kesehatan di sekolah dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS

Salah satu syarat sekolah dapat melaksanakan belajar tatap muka adalah kesiapan sarana sanitasi dan kesehatan yang mampu mendukung penerapan protokol kesehatan di sekolah. Sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan belajar tatap muka maupun yang masih uji coba sudah cukup baik dalam menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana tersebut. Sebelum kelas dimulai, sekolah-sekolah tersebut melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruang kelas termasuk ruang UKS yang difungsikan untuk menampung warga sekolah yang mengalami gejala demam, batuk, flu, pilek, dan sebagainya.

Dana BOS juga dimanfaatkan sekolah untuk menyiapkan masker dan pelindung wajah (*face shield*) bagi siapa saja yang memerlukan. Di depan ruang kelas atau di area-area tertentu yang mudah dijangkau, disediakan tempat cuci tangan pakai sabun, serta alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) yang digunakan oleh petugas keamanan sekolah untuk memeriksa suhu tubuh bagi siapa saja yang akan masuk ke lingkungan sekolah.

Untuk menjamin penerapan protokol berjalan dengan baik, sekolah membentuk tim satuan tugas (satgas) tingkat sekolah yang beranggotakan guru dan tenaga kependidikan. Tugas mereka adalah memastikan kesiapan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka agar berlangsung dengan aman. Mereka juga bertugas untuk memantau perkembangan kesehatan warga sekolah. Sekolah juga mengoptimalkan fungsi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai ruang transit bagi siapa saja yang sakit dan mengalami gejala COVID-19. Sebelum memasuki ruang kelas, telah disediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan semua siswa harus mengantre dengan tertib sesuai tanda yang sudah dibuat.

Pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara terbatas mengikuti protokol kesehatan, namun dengan cara yang bervariasi sesuai konteks lokal

Sebelum semua itu dilakukan, pihak sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa atau ada juga yang menyurati orang tua siswa sebagai pemberitahuan bahwa sekolah akan memulai pembelajaran tatap muka. Hal ini juga dimaksudkan sebagai cara untuk meminta izin orang tua apakah anaknya dibolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau tidak.

Untuk memastikan semua orang yang masuk ke dalam lingkungan sekolah dalam kondisi sehat, di pintu gerbang sekolah dijaga oleh petugas, baik dari tim keamanan sekolah maupun guru atau siswa yang ditugaskan untuk memeriksa suhu tubuh menggunakan *thermogun*. Sesuai dengan protokol kesehatan, bagi siapa saja dengan suhu tubuh di atas 37,5°C, tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan sekolah dan akan dipulangkan.

Pada ruang kelas dan ruang lainnya, termasuk ruang UKS, dilakukan penyemprotan disinfektan, baik sebelum dan sesudah digunakan. Beberapa daerah dalam melakukan penyemprotan disinfektan ini bekerja sama dengan dinas kesehatan, kecamatan, puskesmas, atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).



Gambar 1.



Gambar 2.



Gambar 3.

Keterangan :

Gambar 1. Ruang UKS sebagai ruang isolasi sementara di SMA Negeri 2 Praya, Lombok, NTB

Gambar 2. Pemeriksaan suhu tubuh pada saat kedatangan oleh siswa/petugas di SMK Negeri 2 Pangkalpinang, Bangka Belitung

Gambar 3. Penyemprotan disinfektan di ruang kelas di SMA Negeri 1 Langsa, Aceh

Pengaturan jarak duduk dalam kelas diatur berjarak rata-rata 1-1,5 meter. Setiap meja hanya diisi oleh satu orang siswa. Jumlah siswa yang boleh berada di dalam kelas dibatasi maksimal 50%. Sementara sebagian siswa belajar di sekolah, sebagian siswa lainnya belajar dari rumah. Ada yang mengikuti pembelajaran di sekolah secara daring, ada juga yang diberikan tugas dan akan dinilai pada saat giliran mereka belajar di sekolah.

Sekolah-sekolah di daerah tersebut telah mendapat izin dari pemerintah daerah melalui Surat Keputusan Kepala Daerah. Ketika daerah mengalami perubahan kondisi zona epidemiologi, kepala daerahnya juga menerbitkan kembali surat keputusan sesuai dengan perubahan zona daerah mereka. Pihak dinas pendidikan setempat juga melakukan kunjungan untuk memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah tersebut.

Terdapat juga sekolah-sekolah yang mengembangkan sendiri praktik pembelajaran tatap muka dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di sekolah. Contoh praktik yang mereka terapkan misalnya, pada jam-jam tertentu, pembelajaran di dalam kelas dipindahkan ke halaman sekolah yang luas di ruang terbuka, sehingga jarak duduk antarsiswa dapat lebih renggang dan meminimalisasi bersentuhan satu sama lain.



Gambar 4.



Gambar 5.

Keterangan :

Gambar 4. Dinas pendidikan memantau jalannya pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Praya, Lombok, NTB

Gambar 5. Siswa diajak untuk belajar di halaman sekolah di SMP Negeri 1 Kuala Batee, Aceh Barat Daya

Sebagian warga sekolah masih kerap lalai dalam mematuhi protokol kesehatan karena belum optimalnya pengawasan

Apabila dilihat dari aspek fasilitas dan sarana kebersihan dan kesehatan, sekolah-sekolah yang menyelenggarakan PTM sudah memenuhi syarat pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Namun, warga sekolah sering kali belum terbiasa dengan disiplin protokol kesehatan. Sebagai contoh, pada sekolah-sekolah tersebut, baik guru maupun siswa masih banyak yang memakai masker tidak sebagaimana mestinya. Rata-rata siswa juga melakukan cuci tangan pakai sabun hanya pada saat akan memasuki kelas di waktu pagi hari. Hal yang masih sulit dihindari adalah kebiasaan untuk menjaga jarak. Walaupun di dalam kelas sudah diatur jarak minimal 1,5 meter dan tiap meja hanya diisi oleh satu orang siswa, tetapi di jam-jam tertentu mereka masih sering berkumpul untuk makan bersama.

Ikatan Guru Indonesia (IGI) jauh-jauh hari telah mengingatkan jika penerapan protokol kesehatan sulit dilakukan karena kecenderungan anak-anak yang saling bersentuhan saat bersenda gurau atau bercengkerama (tribunnews.com, 2020). Apalagi bagi anak-anak di jenjang sekolah dasar karena psikologi mereka cenderung ingin terus bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya (merdeka.com, 2021). Tidak hanya untuk anak-anak di jenjang SD, di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dalam kajian ini juga menunjukkan, siswa masih sering abai dalam berperilaku disiplin protokol kesehatan. Guru juga kadang tidak bisa terus memantau perilaku siswa untuk selalu menghindari terjadinya kontak, misalnya ketika siswa saling meminjam alat tulis dan lainnya.

Begitu krusialnya pembelajaran tatap muka di tengah-tengah pandemi saat ini, sampai kepala daerah turun langsung untuk melihat pelaksanaannya di sekolah. Di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo turun langsung ke beberapa sekolah yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka (semarang.bisnis.com, 2021). Menurutnya, sarana, prasarana, dan SOP sudah baik, tetapi yang sulit adalah menjaga sikap untuk tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan. Justru ditemukan, banyak guru yang masih berkerumun dan tidak memakai masker dengan benar, bahkan ada yang melepas masker ketika berbicara. Guru juga tidak sadar ada yang memberikan telepon genggamnya kepada siswa untuk mengambil foto, padahal sangat dilarang untuk saling bertukar benda atau barang satu sama lain. Hal-hal kecil seperti ini jika tidak diperhatikan justru rentan terhadap penularan COVID-19.

Tantangan terbesar pengawasan kepatuhan pada protokol kesehatan adalah saat siswa sudah berada di luar lingkungan sekolah

Sekolah secara umum sudah mempersiapkan pembelajaran tatap muka yang aman dari penyebaran dan penularan COVID-19 dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukungnya. Namun, memastikan seluruh warga sekolah untuk berdisiplin mematuhi protokol kesehatan adalah hal yang tidak mudah. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan merupakan sebuah kebiasaan baru, sehingga membutuhkan penyesuaian atau adaptasi terhadapnya. Lingkungan sekolah yang sudah didesain sesuai protokol kesehatan, dalam praktiknya masih belum optimal karena hal-hal kecil masih kerap terjadi, seperti saling tukar barang, bersentuhan, atau tidak mengenakan masker dengan benar. Mencuci tangan secara berkala juga masih perlu pembiasaan di kalangan warga sekolah.

Sikap tidak disiplin akan lebih terlihat pada saat pulang sekolah (Ato, 2021). Beberapa sekolah memang membuat peraturan siswa harus dijemput oleh orang tua atau keluarga, tetapi tidak sedikit juga siswa pulang sendiri, baik dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi pada saat kedatangan siswa. Jika diantar oleh orang tua, maka mengurangi kemungkinan kontak dengan orang lain selama dalam perjalanan. Namun, bila menggunakan kendaraan umum, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kontak dengan orang lain.

Sekolah juga tidak dapat memastikan apakah siswa akan langsung pulang ke rumah atau bermain ke tempat-tempat tertentu, baik bersama teman maupun sendiri. Hal ini sangat besar kemungkinan terjadi di jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama, sedangkan pada sekolah dasar umumnya siswa ketika pulang langsung ke rumah atau dijemput oleh orang tuanya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dari kajian ini, maka terdapat beberapa kebijakan yang dapat dilakukan.

1. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna menjamin kesehatan dan keselamatan warga sekolah dalam pelaksanaan PTM

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di beberapa daerah maupun yang melakukan uji coba telah menerapkan SOP protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, terutama dalam SKB 4 Menteri. Pembelajaran tatap muka terbatas, mendorong inisiatif pemerintah menyediakan dukungan berupa sarana dan prasarana di sekolah, melalui optimalisasi pemanfaatan dana BOS. Jika evaluasi pembelajaran tatap muka dinilai baik dan akan dilakukan pembukaan sekolah secara lebih luas, maka sekolah perlu menjamin penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sekolah dapat bekerja sama dengan instansi terkait di daerah, dinas pendidikan, puskesmas, dan kecamatan, untuk melakukan pemantauan dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan serta pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang aman bagi warga sekolah.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memetakan satuan pendidikan mana saja yang telah mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap dan bila perlu memeriksa langsung ke satuan pendidikan untuk memastikan jika satuan pendidikan tersebut telah benar-benar siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pemerintah daerah juga dapat berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 daerah untuk melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan PTM di satuan pendidikan. Jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan, pemerintah daerah dapat memberikan sanksi penghentian pembelajaran tatap muka sementara sampai satuan pendidikan tersebut kembali menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat.

2. Mengoptimalkan pengawasan untuk memastikan seluruh warga sekolah disiplin mematuhi protokol kesehatan di lingkungan sekolah

Selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan baik oleh siswa maupun guru. Walaupun pelanggaran itu tampak sepele, tetapi akan sangat berpengaruh terhadap penyebaran dan penularan COVID-19 di sekolah, misalnya masih berkumpul atau berkerumun, saling bertukar barang, tidak memakai masker dengan benar, dan tidak sering mencuci tangan. Untuk itu, sekolah yang sudah memiliki satuan tugas COVID-19 perlu lebih tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Satuan tugas sekolah dapat bekerja sama dengan satuan tugas kecamatan atau kelurahan untuk secara berkala memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Edukasi dan sosialisasi tentang pola penyebaran dan penularan COVID-19 perlu senantiasa dilakukan secara berkala guna menanamkan kepada warga sekolah bahwa penyebaran COVID-19 masih belum berakhir dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, dan satuan tugas COVID-19, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten/kota.

Edukasi dan sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memperbanyak seruan-seruan dan ajakan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dalam bentuk poster-poster maupun gambar-gambar yang dipasang di lingkungan sekolah. Selain itu, dengan menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang protokol kesehatan, seperti sarana cuci tangan pakai sabun, masker, *hand sanitizer*, pelindung wajah, alat periksa tubuh, dan sebagainya, akan membiasakan warga satuan pendidikan untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan yang dianjurkan dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

3. Melibatkan orang tua, masyarakat, dan instansi terkait untuk memantau siswa pada jam-jam tertentu, terutama saat berangkat dan pulang sekolah

Untuk membantu sekolah dalam memantau dan mengawasi siswa selama berada di luar sekolah, khususnya ketika berangkat dan pulang sekolah, peran orang tua sangat besar dalam mengantar dan menjemput anak-anaknya. Orang tua juga diharapkan untuk proaktif memberikan informasi terkait perkembangan kesehatan anak mereka kepada sekolah untuk memastikan tidak ada anak atau siswa yang sakit berada di sekolah karena akan membahayakan bagi yang lainnya. Selain itu, masyarakat di lingkungan sekolah juga perlu diajak kerja sama untuk memantau siswa supaya tidak berkeliaran di jam-jam tersebut. Masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi kepada sekolah jika mengetahui ada siswa sekolah tersebut yang berkerumun di lingkungan sekitar sekolah.

Selain itu, dinas pendidikan dan sekolah dapat bekerja sama dengan kepolisian, polisi pamong praja (Satpol PP) dan dinas perhubungan setempat untuk melakukan razia bagi siswa-siswa yang berada di tempat-tempat umum di jam-jam sekolah. Pihak kepolisian maupun Satpol PP dapat mendata dan mengembalikan siswa-siswa yang kedapatan berada di luar sekolah pada jam belajar. Sedangkan dinas perhubungan dapat membantu mengarahkan siswa ke tempat-tempat yang disediakan untuk pengantaran dan penjemputan siswa. Bagi siswa yang menggunakan kendaraan umum juga dapat dibantu dengan memastikan mereka menunggu kendaraan umum di halte-halte yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Ato, Stefanus. (2021). Protokol Kesehatan Rentan dilanggar Saat Siswa Pulang Sekolah. Sumber: <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/04/08/pelanggaran-protokol-kesehatan-rentan-terjadi-saat-siswa-pulang-sekolah/>.
- Julizar, Kaisar, HW, Lucia, Susanto, Arie B. (2020). Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan dan Keselamatan di Satuan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19. Laporan Penelitian Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Merdeka.com. (2021). Disdik Bogor Nilai Penerapan Protokol Kesehatan Belajar Tatap Muka SD Sulit. Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/disdik-bogor-nilai-penerapan-protokol-kesehatan-belajar-tatap-muka-sd-sulit.html>.
- Semarang.bisnis.com. (2021). Hari Pertama PTM, Ini Temuan Ganjar Saat Sidak 2 Sekolah di Semarang. Sumber: <https://semarang.bisnis.com/read/20210405/535/1376603/hari-pertama-ptm-ini-temuan-ganjar-saat-sidak-2-sekolah-di-semarang>.
- SMERU. 2020. Belajar dari Rumah: Potret Ketimpangan Pembelajaran pada Masa Pandemi COVID-19. SMERU Research Institute. Diakses dari: <http://smeru.or.id/id/content/belajar-dari-rumah-potret-ketimpangan-pembelajaran-pada-masa-pandemi-covid-19>
- The Economist, "The Risk of Keeping Schools Closed Far Outweigh the Benefits". Sumber: <https://www.economist.com/leaders/2020/07/18/the-risks-of-keeping-schools-closed-far-outweigh-the-benefits>, diakses 18 Juli 2020
- Tribunnews.com. (2020). Ikatan Guru Indonesia: Protokol Kesehatan Sulit diterapkan Saat Sekolah dibuka. Sumber: <https://www.tribunnews.com/corona/2020/06/04/ikatan-guru-indonesia-protokol-kesehatan-sulit-diterapkan-saat-sekolah-dibuka?page=all>.
- World Bank. 2020. Temuan Inti: Estimasi Dampak COVID-19 pada Sistem Pembelajaran dan Pendapatan di Indonesia – Cara Mengubah Arus. The World Bank Agustus 2020.
- Zamjani, Irsyad, Rakhmah, Diyan N, Azizah, Siti Nur, Pratiwi, Indah, Hijriani, Ika, Hidayati, Sri. (2020). Mengatasi Risiko Belajar dari Rumah. Risalah Kebijakan. Pusat Penelitian Kebijakan, BalitbangdanPerbukuanKemendikbud. Sumber: https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/produk/risalah_kebijakan/detail/313437/mengatasi-risiko-belajar-dari-rumah



Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari penelitian/kajian yang dilakukan oleh
Pusat Penelitian Kebijakan

Tim Penyusun

Kaisar Julizar
Lucia Hermien Winingsih
Arie Budi Susanto

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Penelitian Kebijakan

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827